



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ARI HADIARTA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **472978**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.437.000.000**

1. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
3. Tanah Seluas 15255 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. Tanah Seluas 17780 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. Tanah Seluas 17625 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. Tanah Seluas 15375 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. Tanah Seluas 19340 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/176 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
9. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 226.200.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.200.000



2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH 1,5 MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	66.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	99.477.835
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.828.677.835
III. HUTANG	Rp.	156.158.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.672.519.835

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.